

**PERAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *CLUSTER*
UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KELURAHAN
REJOWINANGUN, KECAMATAN KOTAGEDE, KOTA
YOGYAKARTA**

Oleh

Salsha A. Siregar¹, Rizky Septiana Widyaningtyas²

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengembangan objek wisata dengan menggunakan sistem *cluster* untuk meningkatkan perekonomian di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini bersifat normatif-empiris dengan menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum bersifat normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara dengan responden terkait objek masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan objek wisata dengan menggunakan sistem *cluster* di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan perannya seperti mengadakan workshop, promosi kampung wisata, akreditasi lomba kampung wisata dan pelatihan-pelatihan ketrampilan lain. Namun masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pengembangan objek wisata *cluster* ini seperti faktor kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional, faktor bergantinya kepengurusan di Kelurahan Rejowinangun, faktor pendanaan dari kelurahan yang minim dan kurangnya dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah akibat saling lempar kepentingan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan dan diklat untuk meningkatkan profesionalitas SDM, bermusyawarah dengan pihak kelurahan terkait dengan promosi kampung wisata, mengatasi minimnya dana masih dengan mengandalkan pendapatan dari penjualan paket-paket wisata, pendapatan dari mengisi *event-event* dan dana atau barang hasil mengajukan proposal ke instansi-instansi terkait.

Kata Kunci : Pengembangan, Pengelolaan, Pariwisata, Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum UGM

² Dosen Fakultas Hukum UGM

THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF YOGYAKARTA CITY IN DEVELOPING TOURISM OBJECTS USING THE CLUSTER SYSTEM TO IMPROVE ECONOMY IN THE REJOWINANGUN VILLAGE, KOTAGEDE SUBDISTRICT, YOGYAKARTA CITY

By

Salsha A. Siregar¹, Rizky Septiana Widyaningtyas²

ABSTRACT

This research is to find out and examine how the Role of the Yogyakarta City Government in developing tourism objects by using a cluster system to improve the economy in the Rejowinangun Village, Kotagede Subdistrict, Yogyakarta City and to find out the problems faced and the efforts of the Yogyakarta City Government to resolve these problems.

This research is normative-empirical by using descriptive legal research types. Legal research is normative carried out by library research related to the object under study to obtain secondary data. Empirical legal research is done by coming directly to the research location to conduct interviews with respondents regarding the object of the problem under study to obtain secondary data.

Based on the results of the study, it is known that the development of tourist objects using the cluster system in the Rejowinangun Village, Kotagede Subdistrict, Yogyakarta City which was carried out by the Yogyakarta City Government has carried out its role such as holding workshops, promoting tourism villages, accreditation and tourism village competitions. But there are still problems in the development of this cluster tourist attraction such as the lack of human resources, the change of management in the Rejowinangun Urban Village, minimal funding and lack of support from the Regional Work Unit due to mutual interest. Efforts that have been made are to conduct education and training to improve the professionalism of human resources, consult with the kelurahan related to the promotion of tourist villages, overcome the lack of funds still by relying on sales revenue from tour packages, income from filling out events and funds or goods submit proposals to relevant agencies

Keywords : Development, Management, Tourism, Local Government, Tourism Office.

¹ Students of Faculty of Law UGM

² Lecturer of Faculty of Law UGM